

IMPLEMENTASI POLITIK ETIS KOLONIAL BELANDA DI PRINGSEWU TAHUN 1925-1942

Latifah Asmul Fauziyah¹, Suparman Arif², Yusuf Perdana³

¹²³Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia.

*Corresponding-email: latifahasmul15@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Politik Etis Kolonial Belanda Di Pringsewu Tahun 1925-1942. Kebijakan politik etis dilakukan oleh kolonial Belanda dari Tahun 1901-1942. Lampung merupakan salah satu daerah koloni Belanda yang menjadi salah satu tujuan program kolonisasi. Para kolonis disebar ke beberapa daerah di dekat Gedong Tataan, salah satunya daerah Pringsewu. Sebagian besar penduduk Pringsewu adalah orang Jawa, yang berasal dari pemukiman kolonial lama Gedong Tataan. Kebijakan politik etis Kolonisasi, Irigasi, dan Edukasi, juga dilaksanakan di daerah Pringsewu. Maka peneliti tertarik untuk meneliti apa sajakah kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Pringsewu Tahun 1925-1942?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Pringsewu Tahun 1925-1942. Metodologi dalam penelitian ini adalah metode historis dengan empat langkah penelitian yaitu, heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber. Kritik merupakan tahap menguji autensitas sumber. Interpretasi merupakan tahap menginterpretasikan. Tahap terakhir adalah historiografi yang merupakan tahap penulisan. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data historis, kegiatan yang diawali pengumpulan data, kritik sumber yang dikaitkan dengan teori serta metode penelitian sejarah dan kemudian menjadi sebuah fakta sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan, kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Pringsewu Tahun 1925-1942 adalah irigasi dan edukasi (pendidikan). Implementasi sistem irigasi yang dilaksanakan di Pringsewu adalah pembuatan irigasi Way Tebu yang melalui beberapa tahapan diantaranya tahap penyelidikan dan tahap pembangunan dari Way Tebu I-II, Way Tebu III, dan Way Tebu IV. Implementasi program edukasi yang dilaksanakan di Pringsewu adalah membangun beberapa sekolah rakyat dan mendapat campur tangan oleh para kaum misionaris.

Kata Kunci: Pringsewu, Politik Etis, Kolonial Belanda

ABSTRACT

Implementation Of Dutch Colonial Ethical Policy In Pringsewu, 1925-1942. Ethical political policies were carried out by the Dutch colonialists from 1901-1942. Lampung was one of the Dutch colonial areas which became one of the objectives of the colonization program. The colonists were scattered to several areas near Gedong Tataan, one of which was the Pringsewu area. Most of Pringsewu's residents are Javanese, originating from the old colonial settlement of Gedong Tataan. The ethical political policies of Colonization, Irrigation and Education were also implemented in the Pringsewu area. So the researcher is interested in examining what were the ethical political policies of the Dutch colonialists implemented in Pringsewu in 1925-1942? The purpose of this study is to determine the ethical political policies of the Dutch colonialists implemented in Pringsewu in 1925-1942. The methodology in this study is the historical method with four research steps, namely, heuristics is the source gathering stage. Criticism is the stage of testing the authenticity of the source. Interpretation is the interpreting stage. The last stage is historiography which is the writing stage. Data analysis techniques used historical data analysis techniques, activities that begin with data collection, source criticism associated with historical research theories and methods and then become historical facts. The results of this study indicate that the Dutch colonial ethical political policies implemented in Pringsewu in 1925-1942 were irrigation and education (education). The implementation of the irrigation system carried out in Pringsewu is the making of Way Tebu irrigation which goes through several stages including the investigation stage and the development stage from Way Tebu I-II, Way Tebu III, and Way

Tebu IV. The implementation of the educational program carried out in Pringsewu was to build several public schools and received intervention from the missionaries.

Keywords: Pringsewu, Ethical Politics, Dutch Colonial

I. PENDAHULUAN

Politik etis (*ethische politiek*) atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah Belanda untuk membatalisasi pengorbanan rakyat Indonesia selama dilaksanakannya *cultuurstelsel* (Absiroh dan Isjoni, 2017). Kebijakan politik etis dimulai Tahun 1901 melalui pernyataan Ratu Wilhelmina untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Menteri Urusan Daerah Jajahan yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal yaitu Alexander W.F. Idenburg melaksanakan politik etis dimulai Tahun 1902 dengan tiga prinsip utama yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk (Ricklefs, 2005). Pendidikan, irigasi, dan kolonisasi adalah tiga agenda politik politik etis, yang sering dikenal sebagai "*trias van Deventer*". Irigasi sebagai bagian dari dukungan pertanian dan pemerataan penduduk untuk perkebunan. Sementara itu, pendidikan berkaitan dengan menjawab tuntutan administrasi pemerintahan di kalangan tertentu yang kemudian menghasilkan kaum elit baru yang dikenal dengan elit kontemporer (berpendidikan) (Galih, 2017).

Kolonisasi adalah program Hindia Belanda yang memindahkan pemukiman masyarakat dari tempat-tempat yang sangat padat di Jawa ke daerah-daerah yang jarang berpenghuni di luar Jawa dalam bentuk komunitas pertanian baru yang diawasi dan disponsori oleh Hindia Belanda. Prakarsa ini dirancang untuk mengembangkan petani baru di luar Jawa, sehingga produksi pertanian, yang sebelumnya hanya mengandalkan Jawa, akan merata di seluruh Hindia Belanda (Levang, 2003). Program kolonisasi dipakai pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Alasannya karena di dua pulau tersebut jumlah penduduk pada 1900 mencapai 14 juta jiwa. Apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luar Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Akhirnya pemerintah Belanda membuat pemukiman baru dan memindahkan penduduk ke pulau Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan daerah-daerah koloni lainnya (Galih, 2017).

Lampung sejak lama dianggap sebagai lokasi kolonisasi penduduk era kolonial. Heyting memindahkan 155 KK dari Karesidenan Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan, Lampung, pada Tahun 1905. Bagelen merupakan desa koloni pertama yang diciptakan oleh para pendatang di lokasi itu. Antara 1906 dan 1911, empat desa lainnya lebih lanjut didirikan. Setiap kepala keluarga diberi 70 hektar tanaman padi dan 30 hektar pekarangan. Biaya transportasi, bahan bangunan, peralatan dan jaminan hidup (selama 2 tahun) di tanggung oleh proyek (Levang, 2003). Pada periode awal kolonisasi ini dianggap kurang memuaskan sebab masih berupa percobaan, kemudian pada Tahun 1906 Heyting digantikan oleh Van Dissel sebagai pemimpin kolonisasi. Pada masa Van Dissel di buka desa-desa kolonisasi lainnya. Mereka disebar ke beberapa daerah di dekat Gedong Tataan, salah satunya daerah Pringsewu. Pringsewu adalah sebuah wilayah yang berada di Karesidenan Lampung. Sebagian besar penduduk Pringsewu adalah orang Jawa, yang berasal dari pemukiman kolonial lama Gedong Tataan (Dewi, Imron dan Susanto, 2017).

Dimulai dari penerapan kolonisasi di Pringsewu, menurut surat kabar Hindia Belanda yang bernama *De Indische courant* terbitan tanggal 16 April 1938 dengan judul *De oudste Javanenkolonisatie-Gedong Tataatim- Als op Java-De kolonisatie in cijfers -De ondernemingen*, yang memuat informasi terkait adanya pemekaran daerah Gedong Tataan yakni nama Bagelen Tahun 1905, Gadingredjo Tahun 1906, Pringsewoe 1925, Goemoekmas Tahun 1929, dan Pagelaran Tahun 1931 (*De Indische Courant*, 1938). Wilayah Pringsewu sesuai dengan rencana Scalwijk secara resmi dibuka pada tanggal 9 September 1925 dan masuk dalam pemerintah Kawedanan Gedong Tataan, kemudian desa bukaan baru tersebut

dibentuk struktur pemerintahan desa seperti yang pada desa kolonisasi lama Bagelen Gedong Tataan (Dewi, Imron dan Susanto, 2017). Dari sinilah dapat ditunjukkan bahwasannya Pringsewu secara resmi didirikan Tahun 1925.

Daerah ini mulai didiami pada Tahun 1925 akibat dari semakin besar dan padatnya penduduk di desa Bagelen, sehingga generasi ke dua bahkan ke tiga harus mencari lokasi pemukiman baru. Penamaan wilayah ketika itu diberikan oleh orang yang dituakan ataupun kepala tebang (tokoh masyarakat) yang pertama kali datang dan membuka perkampungan pedesaan tersebut dengan berdasarkan pada kondisi daerah yang ketika itu masih berupa hutan bambu yang kemudian dibuka menjadi suatu daerah baru dengan nama bambu seribu atau dalam bahasa Jawa disebut Pringsewu. Tingkat kepadatan penduduk pada waktu itu tidaklah begitu padat. Menurut Levang pada awal pembukaaan desa Tahun 1925 tingkat kepadatan penduduk di daerah Pringsewu hanya sebesar 8 jiwa per km² (Levang, 2003).

Sistem irigasi kemudian dibuat dan dikembangkan di Pringsewu yang disebut dengan irigasi Way Tebu. Jaringan irigasi Way Tebu yang direncanakan dan dikembangkan sejak Tahun 1922 yang diawali dengan survei dan pengukuran debit air oleh jawatan irigasi, yang baru dapat dilakukan pada Tahun 1926. Pembangunan jaringan irigasi ini dibagi menjadi tiga sektor: Irigasi Way Tebu I-II, Way Tebu III, dan Way Tebu IV. Pemerintah kolonial membangun bendungan Way Tebu I-II pada Tahun 1926. Sektor pembangunan Way Tebu III merupakan kelanjutan dari sektor Way Tebu I-II yang selesai dibangun pada Tahun 1927. Setelah itu, talang didirikan di mana struktur warisan ini masih berdiri dan digunakan sebagai objek wisata sejarah hingga saat ini. Talang Air didirikan pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1928. Talang Air ini menghubungkan aliran air dari sistem irigasi Way Tebu ke lokasi lahan pertanian di kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, Way Tebu IV merupakan bendungan terakhir yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Bendungan ini dibangun pada Tahun 1938 (Karsiwan, W., & Basri, 2013). Infrastruktur irigasi yang lebih baik akan meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Hindia Belanda telah menciptakan sistem irigasi yang sebelumnya tidak menjadi prioritas bagi pertumbuhan Indonesia. Akibatnya, irigasi sangat bermanfaat pada zamannya, dan masih cukup berharga hingga sekarang, untuk mengairi sawah dan perkebunan sepanjang musim kemarau.

Beberapa sekolah dibangun di Pringsewu selama era politik etis yang diilhami oleh para misionaris. Wilayah Kolonial Bagelen di Gedong Tataan memiliki sekolah desa, begitu juga dengan wilayah Marga bagi suku Way Semah dan Way Lima asli. Sekolah menengah hanya terletak di komunitas kolonial Jawa Pringsewu, Gading Rejo, dan Bulukerto, dan di antara masyarakat Way Semah asli di Kedondong. Di Ganjaran dan Bumi Arum, sekolah desa dan sekolah kelas dua didirikan. Pendidikan di Pringsewu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, dengan dua HIS, sebelas sekolah umum, dan dua *Vervolgschools* didirikan pada Tahun 1938 (Dewi, Imron and Susanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas belum adanya penelitian terkait pelaksanaan politik etis di Pringsewu yang dimulai pada Tahun 1925 sampai pada Tahun 1942 ketika berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pada sebuah penelitian dengan rumusan masalah apa sajakah kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Kabupaten Pringsewu?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Pringsewu Tahun 1925-1942.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995), metode historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu

untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu. Hasil penelitian sejarah dapat digunakan untuk memprediksi peristiwa atau situasi di masa depan. Pendekatan historis lebih berfokus pada data masa lalu seperti artefak, dokumen, arsip dan tempat-tempat yang dianggap sakral. Tujuan penelitian sejarah adalah merekonstruksi masa lalu secara obyektif dan sistematis dengan mengumpulkan, memverifikasi, menjelaskan, mensintesis, dan menulis cerita sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi (kritik), interpretasi, dan historiografi.

Heuristik adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan penelitian (Laksono, 2018). Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan. Sumber-sumber yang dimaksud berupa buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku-buku maupun dokumen baik bentuk tercetak maupun non-cetak (e-book).

Kritik adalah menilai atau menguji bahan-bahan sumber untuk menentukan atau menetapkan autentisitas atau kebenaran (Wasino and Hartatik, 2018). Dimana sumber tersebut adalah sumber yang diperoleh dalam tahap heuristik. Pada tahap ini, peneliti melakukan kritik pada sumber yang telah dikumpulkan, kritik ini dilakukan baik dari segi fisik dan dari segi isi sumber. Dari segi fisik peneliti melihat apakah sumber yang dikumpulkan dapat terbukti keasliannya dengan melihat aspek-aspek fisik sumber seperti gaya bahasa, gaya penulisan, dan sebagainya. Adapun dari segi isi, peneliti mencoba untuk melihat apakah sumber yang dikumpulkan mengandung informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti dalam hal ini adalah implementasi politik etis kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1925-1942.

Interpretasi merupakan proses pemberian penafsiran terhadap fakta yang telah dikumpulkan. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara fakta yang satu dengan yang lainnya baik itu fakta yang diperoleh dari sumber tertulis maupun sumber lisan. Tahap interpretasi merupakan proses analitis kritis merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara metode satu dan yang lainnya. Pada tahap ini menuntut kehati-hatian dan integritas peneliti untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah pada sumber yang telah melalui tahapan heuristik dan kritik di atas pada data-data yang berhubungan dengan penelitian peneliti yaitu mengenai implementasi politik etis kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1925-1942.

Historiografi (Penulisan Sejarah) merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Secara umum historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan penelitian sejarah yang telah dilakukan sebagai tahap akhir dalam penelitian sejarah. Hasil dari penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang Jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) hingga tahap akhir (Penerikan kesimpulan) (Abdurrahman, 2011). Tahap ini penulis akan menyusun data-data yang sesuai dengan sumber sumber yang telah melewati tiga tahapan sebelumnya menjadi rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan kronologis dan sejarah yang sesuai dengan penelitian peneliti, dalam hal ini yaitu yang akan dirangkai menggunakan historiografi adalah hasil sumber-sumber kajian yang membahas mengenai Implementasi Politik Etis Kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1925-1942.

III. HASIL DANN PEMBAHASAN

A. Implementasi Politik Etis di Pringsewu Tahun 1925-1942

Kebijakan politik etis diterapkan dalam tiga program. Program tersebut adalah kolonisasi, irigasi (pengairan), dan edukasi (pendidikan). Berikut implementasi program politik etis di Pringsewu Tahun 1925-1945.

1) Program Kolonisasi

Kolonisasi merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-XX. Daerah pertama yang dijadikan sebagai pusat kolonisasi yaitu sebelah selatan pulau Sumatera tepatnya berada di daerah Lampung yaitu Gedong Tataan pada Tahun 1905. Semakin berkembangnya wilayah di Gedong Tataan tersebut menyebabkan kurangnya wilayah tempat tinggal dan kepadatan penduduk yang meningkat, sehingga pada saat itu para kolonis memerlukan tempat tinggal baru untuk bertahan hidup. Pemerintah koloni merancang perluasan daerah kolonisasi menuju ke sebelah barat dan utara wilayah Bagelen yaitu menuju wilayah Gadingredjo, Purworedjo.

Pringsewu berdiri pada Tahun 1925, dibuktikan dengan berita pada surat kabar Belanda bernama *De Indische Courant* terbitan tanggal 16 April 1938 dengan judul *De oudste Javanenkolonisatie-Gedong Tataatim- Als op Java-De kolonisatie in cijfers -De ondernemingen*, yang memuat informasi terkait adanya pemekaran daerah Gedong Tataan yakni nama Bagelen Tahun 1905, Gadingredjo Tahun 1906, Pringsewoe 1925, Goemoekmas Tahun 1929, dan Pagelaran Tahun 1931, dan surat kabar yang sama namun berbeda Tahun terbit yaitu, *De Indische Courant* terbit pada 26 April 1940 dalam artikel berjudul *Menu-onderzoek in de Lampongs* yang menyebutkan Pringsewu dengan keterangan bahwa wilayah ini sudah ada sejak Tahun 1925, yang menjadi bagian kewedanan Gedong Tataan. Nama Pringsewu juga muncul dalam catatan arsip pada peta wilayah Kolonisasi Jawa sebagai salah satu materi isi laporan memori serah terima jabatan (*Memorie van Overgave*) *Bestuur Memorie Onderafdeeling Telokbetong* yang dilaporkan oleh J. Van der Zwaal, Controleur Binnenlands Bestur pada periode Maret 1931-17 Agustus 1934. Penamaan Pringsewu dalam arsip tersebut menggunakan nama *Papringansewoe*. Pada arsip ini juga telah muncul wilayah-wilayah desa lain seperti *Podomoro*, *Papringanombo*, *Padjaresok*, *Sidorejo*, *Djogjakarta*, *Wonokarto*, *Wonosari*, *Toeloengagoeng*, *Soerakarta*, dan desa-desa lain yang ada di Pringsewu saat ini.

Halaman lain pada *Bestuur Memorie Onderafdeeling Telokbetong* yang dilaporkan oleh J. Van der Zwaal terdapat keterangan yang menunjukkan bahwasannya banyak pemukim Gedong Tataan yang memilih mendiami tanah-tanah marga dengan alasan untuk mendapatkan tanah sawah yang berada di marga terdekat, kemudian menghasilkan desa-desa baru sebagai perluasan daerah kolonisasi Gedong Tataan. Desa-desa tersebut antara lain *Pandjeredjo* (1932) dengan jumlah penduduk 296 jiwa, *Blitarredjo* (1932) dengan jumlah penduduk 279 jiwa, *Ambarawa* (1933) dengan jumlah 149 jiwa, *Margodadi* (1932) dengan penduduk berjumlah 615 jiwa, *Wolojodadi* (1932) dengan penduduk 382 jiwa, dan *Tanjoeng Anom* (1934) dengan penduduk 311 jiwa.

Arsip pada *Bestuur Memorie Onderafdeeling Telokbetong* yang dilaporkan oleh J. Van der Zwaal menyebutkan desa-desa yang saat ini masuk ke dalam administrasi wilayah Pringsewu, namun tidak ada data yang menyebutkan bahwasannya desa-desa tersebut dahulu juga merupakan wilayah Pringsewu, hanya disebutkan bahwasannya desa-desa tersebut merupakan perluasan dari kolonisasi Gedong Tataan. Berdasarkan data atau sumber yang telah dijelaskan dalam hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kolonisasi di Pringsewu tidak terlaksana ataupun tidak pernah terjadi.

Alasannya karena peneliti tidak menemukan data yang menunjukkan proses terjadinya kolonisasi di Pringsewu.

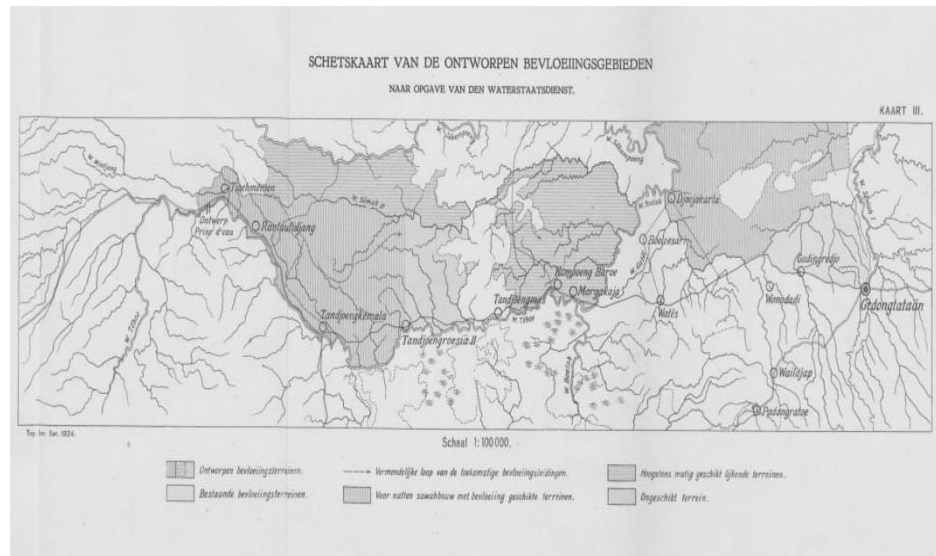
Daerah Pringsewu mulai ramai ketika menjadi pusat ibukota kedewanan Gedong Tataan Tahun 1936. Hal tersebut dijelaskan dalam koran Belanda *De Indische Courant* terbit pada tanggal 20 Desember 1937 dengan judul artikel *De onderwijs-zorg* bahwa Pringsewu menjadi titik terpenting Gedong Tataan dari segi administrasi. Jabatan asisten wedono akan segera dipindahkan dari Gadingrejo ke Pringsewu. Koran Belanda *Bataviaasch Nieuwsblad* terbit tanggal 25 Mei 1939 dengan judul artikel *Gedong Tataan krijgt eigen bij-postkantoor* menjelaskan juga bahwa akan dibukanya suatu kantor pos pembantu di Pringsewu. Awalnya kantor pos ini akan dibangun di Gadingrejo namun tidak jadi karena pusat kedewanaan berada di Pringsewu. Kantor kabupaten dipindahkan dari tempat terakhir ke Pringsewu pada Tahun 1938. Pringsewu bukan hanya tempat kedudukan wedana, tetapi juga menjadi rumah bagi seorang misi dengan rumah sakit dan sekolah, ada juga perusahaan transportasi bus besar dan penggilingan padi.

2) Program Irigasi

Pelaksanaan program irigasi di Keresidenan Lampung sedikit terlambat dibandingkan dengan pelaksanaan kolonisasi yang telah dimulai sejak Tahun 1905. Pembangunan irigasi baru dilaksanakan sekitar Tahun 1916 di wilayah kolonisasi Gedong Tataan. Pada awal pelaksanaan kolonisasi di Gedong Tataan orang-orang mengira air irigasi cukup untuk mengairi tanah-tanah pertanian di wilayah ini. Jumlah tanah pertanian pada Tahun 1919 sangat bertambah. Tidak hanya ladang, namun sawah juga bertambah luas. Hal ini dikarenakan bertambahnya saluran irigasi sehingga panen pada tahun ini juga membaik. Akan tetapi terjadi kesalahan dalam pengukuran debit air. Pekerjaan-pekerjaan irigasi yang telah memakan biaya sebesar f 436.000 dalam Tahun 1921, harus ditambah dengan pekerjaan irigasi baru dan mahal, karena air dari irigasi yang sudah dibuat sama sekali tidak mencukupi. Menurut perhitungan jawatan irigasi, tanah yang akan dapat dialiri seluas 4115 bau, termasuk 2810 bau tanah kolonisasi. Tetapi setelah irigasi selesai, ternyata untuk mengairi 670 bau tanah kolonisasi sudah mendapatkan kesukaran.

Jawatan irigasi mengusulkan untuk membuat pengairan di sebelah utara Way Tebu dengan biaya f 1.230.000. Melalui pembuatan irigasi ini tanah kolonisasi yang diari dapat bertambah seluas 3740 bau, selain 300 bau tempat yang sudah ditempati. Usul ini baru diterima oleh Schalkwijk setelah usul untuk mengeringkan Rawa Kementara ditolak karena biaya yang besar. Akan tetapi, usul pengairan Way Tebu juga tidak diterima pemerintah dikarenakan biaya yang semula ditetapkan f 1.230.000, ternyata menurut perhitungan Departemen Pekerja Umum dalam Tahun 1923 adalah f 2,3 miliun, sehingga menjadi dua kali dari perhitungan Tahun 1922 (Sjamsu, 1956).

Pada Tahun 1922 rencana pembangunan irigasi dimulai dengan survey dan pengukuran debit air oleh jawatan irigasi. Peta di atas merupakan keterangan sungai-sungai yang dipertimbangkan untuk penyelidikan. Dalam peta tersebut tertera Way Teboe, Way Ilahan, Way Moera Aboeng, dan Way Mintjang. Peta tersebut juga menunjukkan tempat pengambilan sampel air, pasir, kerikil, dan batuan dari sungai-sungai tersebut. Dalam hal ini departemen pengelolaan air menentukan nilai air sungai-sungai untuk irigasi, maka dibuatlah perbandingan antara air di Way Teboe, Way Ilahan, Way Mintjang dan Way Muara Aboeng dengan sungai-sungai di Jawa dan di Lampung yang airnya sudah terbukti cocok digunakan untuk irigasi. Tidak hanya membandingkan air saja, namun departemen pengelolaan air juga memperhatikan kandungan garam, lumpur, dan fosfat dalam air (White, 1925).



Gambar 1. Sketsa Peta Daerah Irigasi yang Dirancang Sesuai dengan Spesifikasi Departemen Pengelolaan Air.

Sumber: White (1925).

Peta diatas merupakan sketsa Daerah Irigasi (D.I) yang dirancang oleh Departemen Pengelolaan Air. Penyelidikan terkait irigasi tersebut mendapatkan kesimpulan sesuai dengan peta yang terlampir sesuai penjelasan White (1925) bahwa:

1. Lokasi yang memenuhi syarat, terletak di sebelah barat antara sungai Way Sekampong, Way Semah II dan Way Teboe, yang mengalir dari barat ke timur, sangat cocok untuk pembangunan sawah.
2. Sebagian tanah yang terletak di antara Tandjoeng Mas dan Way Boeloh, dan bagian paling barat dari daerah irigasi yang direncanakan, harus dianggap bernilai meragukan, dan medan antara Tandjoeng Mas dan Tandjoeng Roesia II tentunya harus dinyatakan tidak layak.
3. Lembah Way Boeloh lebih cocok untuk pertanian lahan kering, penanaman teratur dari tanaman yang menuntut akar datar sebagian besar akan cocok. Deretan perbukitan tua di Tandjoeng Mas hanya tampaknya cocok untuk pertanian ekstensif, budaya populasi seperti lada, penanaman pekarangan atau konstruksi ladang dengan interval yang lama. Dataran tinggi tuf tua sebagian besar tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dataran tinggi ini dibiarkan berhutan atau digunakan sebagai padang rumput ternak.

Daerah Irigasi Way Tebu merupakan salah satu irigasi yang yang melewati tahap penyelidikan yang telah dijelaskan di atas. Saat ini Way Tebu berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Pembangunan jaringan irigasi Way Tebu dilakukan secara bertahap melalui beberapa fase, yaitu fase perencanaan Tahun 1922, dan pembangunan tahap awal Tahun 1926 hingga Tahun 1938. Pelaksanaan pembangunan irigasi Way Tebu terbagi menjadi tiga sektor, antara lain: sektor Way Tebu I-II, sektor Way Tebu III, dan sektor Way Tebu IV.

Sektor Way Tebu I-II

Way Tebu I-II berada di bagian hulu yang terletak di Dusun Banjar Agung Udik masuk ke dalam Kabupaten Tanggamus, dan merupakan bagian dari sistem Daerah Irigasi Way Tebu. Way Tebu I-II dibangun pada Tahun 1926. Way Tebu I-II ini menangkap aliran sungai

Way Tebu dan kemudian dialirkan ke lahan persawahan para kolonis (Karsiwan & Basri, 2013). Tidak ditemukannya sumber ataupun arsip yang menjelaskan alasan mengapa penamaan Way Tebu I dan Way Tebu II digabung menjadi Way Tebu I-II.

Dalam Karsiwan (2013) dijelaskan bahwasannya proses pengerjaan jaringan irigasi ini dikerjakan dengan melibatkan warga secara gotong royong. Sesuai dengan ketentuan ordonansi pajak sub poin ketiga, bahwa para kolonis wajib bekerja di proyek-proyek pemerintah selama 20 hari setiap tahun termasuk dalam pengerjaan proyek irigasi Way Tebu. Pekerjaan ini dikerjakan oleh kolonis laki-laki berusia 18-50 tahun berdasarkan Staatbland No. 407 Tahun 1919.

Sektor Way Tebu III

Pembangunan sektor Way Tebu III merupakan kelanjutan dari Way Tebu I-II, yang dibangun pada Tahun 1927. Proyek irigasi Way Tebu ini diberi nama *Way-Teboewerken* (*De Locomotief*, 1926). Pembuatan Way Tebu III berfungsi untuk kepentingan para pendatang Jawa di Kabupaten Lampung, yang pengerjaannya dilakukan oleh penduduk pribumi dengan cara gotong royong (*Deli Courant*, 1930).

Luas area Way Tebu III adalah 5 hektar, luas potensi pengairan 2150 hektar dan luas fungsi 1514 hektar, dan panjang saluran induk 4552 meter. Irigasi ini terbagi menjadi dua arah yaitu daerah menuju talang di Pajaresuk dengan jarak 933 meter dari bangunan sadap utama dan kemudian bermuara di Sungai Way Sekampung. Aliran yang kedua yaitu menuju desa Bumiarum yang mengalir ke Sungai Way Bulok dan Way Tebu dan bermuara di Desa Yogyakarta Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Dalam surat kabar Belanda *De Locomotief* terbitan 14 Oktober 1931 dengan judul artikel *Groot irrigatie-werk opengesteld. De Way-Teboe werken*, menjelaskan bahwa, pada tanggal 14 Oktober 1931 proyek irigasi besar Way Tebu resmi dibuka untuk umum. Penyelesaian pekerjaan ekstensif ini membutuhkan kerja keras selama lima tahun dan biaya total f 1.200.000. Sebagai hasil dari realisasi pekerjaan ini, penduduk Jawa di Gedong Tataan akan mampu mengairi sawah-sawah mereka (*De Locomotief*, 1931).

Ditemukan jejak peninggalan talang-talang irigasi yang dibangun sejak kolonial Belanda. Pada waktu itu pembangunan Irigasi Way Tebu III melintasi perbukitan di tiga dusun, diantaranya Pajaresuk, Bumiarum, dan Bumi Ayu yang dihubungkan dengan talang yang berjumlah 5 buah. Kriteria Perencanaan Irigasi (KP-04) menyebutkan bahwa talang adalah saluran buatan yang dibuat menggunakan pasangan beton bertulang, kayu, atau baja, ataupun beton ferrocement, yang kemudian di dalam bangunan talang ini mengalir air dengan permukaan bebas, dan dibuat melintas di atas lembah dengan pajang (Kian Amoro, 2022).

Sektor Way Tebu IV

Way Tebu IV selesai dibangun pada Tahun 1938, yang terletak diantara bendungan Way Tebu I-II dan Way Tebu III. Latar belakang dibuatnya bendung Way Tebu IV karena pemerintah kolonial Belanda debit air yang mengalir melalui irigasi yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh persawahan di daerah kolonisasi, sehingga diperlukan bendungan baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut agar air dapat merata terbagi ke seluruh petak-petak sawah milik warga (Karsiwan, W., & Basri, 2013).

Way Tebu IV sudah mulai dibangun sejak Tahun 1933 sesuai dengan keterangan koran Belanda *Deli courant* yang terbit pada 1 Desember 1933 dengan judul artikel *Kolonisatie Methoden* menjelaskan bahwa di daerah kolonisasi Gedong Tataan terlihat aktivitas yaitu orang-orang sibuk menanam padi. Irigasinya sangat bagus, berkat pekerjaan irigasi, yang sebagian besar selesai sekitar pertengahan Tahun 1931. Tahun ini mereka sibuk menyelesaikan bagian irigasi Way Teboe IV (*Deli Courant*, 1933).

Pengerjaan irigasi Way Tebu IV berdasarkan koran *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* terbitan 2 November 1933 dengan judul artikel *De Kolonisatie op Gedong Tataan: Uitvoering van Wai Teboe IV*, menjelaskan bahwa pekerja pembangunan Way Tebu IV dilakukan oleh kuli Sunda dan warga pemukim Jawa. 180 kuli Sunda yang dikirim ke wilayah kolonisasi, kemudian yang sudah sampai pada tahun ini berjumlah 150 kuli sunda, dan 100 pemukim Jawa akan membantu mengerjakan proyek Way Tebu IV ini (*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 1933).

Memorie van overgave van de residentie Lampongsche Districten yang disusun oleh F.J. Junius menyebutkan bahwa hingga Tahun 1933 lahan persawahan yang telah mendapatkan pengairan seluas 5.542 bouw dan akan meningkat dengan pembangunan irigasi Way Tebu IV yang dapat mengairi lahan seluas 3426 bouw. Terdapat rincian yang dijelaskan dalam arsip tersebut yaitu, total sawah yang terairi 8971 bouw, sawah tadah hujan 1871 bouw, luas pekarangan yang ditanami 2358 bouw, lahan kering 4162 bouw, sehingga total luas lahan yang terairi adalah 17.362 bouw.

Setelah selesainya pembangunan jaringan irigasi Way Tebu, luas areal persawahan ataupun perladangan meningkat. Tercatat pada Tahun 1940 luas areal pertanian meningkat sebanyak 9.732 ha dengan jumlah produksi mencapai 17 ton. Hal ini berdampak pada keberhasilan Keresidenan Lampung menjadi daerah surplus beras sehingga untuk pertama kalinya daerah kolonisasi Lampung melakukan ekspor beras keluar daerah seperti pasar-pasar yang ada di Jakarta.

3) Program Edukasi (Pendidikan)

Program pendidikan dalam implementasi politik etis dilakukan dengan cara mendirikan berbagai sekolah seperti Sekolah Desa, HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) dan Sekolah *Vervolg* pemerintah Belanda, kemudian membangun berbagai Sekolah Desa penduduk asli lampung maupun kolonis. Pendirian sekolah yang telah disebutkan secara umum dikelompokkan berdasarkan mutu dan kualitas sekolah, dan berdasarkan ras serta kelas sosial seperti golongan Eropa, Arab, China dan Pribumi.

Dalam Karsiwan dan Sari (2021) menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juni 1939 Residen Lampung mengeluarkan *besluit* tentang pendirian Sekolah Desa baru di berbagai wilayah Lampung, terjadi perkembangan yang signifikan. *Besluit* tuan besar Residen Lampung pada tanggal 17 Juni 1939 No. 431 dapat dilihat bahwasanya pemerintah kolonial Belanda dalam meningkatkan program edukasi (pendidikan) semakin gencar dalam membangun dan memfasilitasi sekolah-sekolah di Keresidenan Lampung. Menurut *besluit* ini juga disebutkan bahwasannya pemerintah Belanda juga membangun Sekolah Desa kelas dua di Ganjaran dan Bumi Arum yang merupakan wilayah kolonisasi Gedong Tataan yang masuk ke dalam wilayah Pringsewu.

Tabel 4. Jumlah Sekolah Pribumi di Onder Afdeling Teluk Betung, Keresidenan Lampung.

Marga	Sekolah Desa	Sekolah Rakyat	Sekolah Lanjutan
Kolonisasi Gedong Tataan	11	4	3
Way Semah	2	0	0
Way Lima	8	0	1
Jumlah	21	4	4

Sumber Tabel 4 : Majalah Pelita Marga (1937)

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Majalah Pelita Marga Tahun 1937 dapat dilihat bahwasannya daerah Teluk Betung sebagai Ibukota Keresidenan Lampung memiliki 21 Sekolah Desa, 4 Sekolah Rakyat, dan 4 Sekolah Lanjutan. Sekolah Desa tersebar daerah kolonisasi Gedong Tataan, dan daerah penduduk asli marga Way Semah dan Way Lima. Sekolah lanjutan hanya terdapat di daerah Pringsewu, Gading Rejo, dan Bulukerto pada masyarakat kolonis Jawa, serta di Kedondong pada masyarakat asli Way Semah.

Memorie van Overgave Lampongsche Districten oleh Residen F.J. Junius juga mencatat bahwasannya sekolah-sekolah yang telah berdiri di Lampung khususnya di daerah Pringsewu pada waktu itu dan melakukan aktivitas pengajaran antara lain:

- Frobelschool* di Gedung Tataan yang dipimpin oleh Ri. Anges Maria Soetilah.
- Xaverriusschool* di Pringsewu yang merupakan sekolah misi dipimpin oleh Johanna van Arte dan Angeta Ages Mayer.
- Sekolah *Zuster Francois Caneeschool* di Pringsewu yang dipimpin oleh Odilia Katijem dan Christina Lagijem.
- Sekolah Madrasah M. Islamiah di Wonodadi Gedong Tataan dibawah asuhan Moehammad Soengaibo, R. Soerachman dan Soelaiman, dan di Pringsewu dipimpin oleh Hi. Mohd. Noeh.
- Sekolah *Volkschool* di Margakarya dipimpin oleh Aliman.

Sekolah pertama yang dibangun adalah *Volkschool* yang diberi nama *St. Beda School* pada Tahun 1932 yang berlokasi di Pringombo. Nama ini digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada Muder M. Beda, pemimpin Jenderal kongregasi mereka di Thuine. Sekolah ini diasuh oleh suster-suster Fransiskanes. Sekolah ini di kepalai oleh Ibu Siti Fatimah yang merupakan guru lulusan Holland Inlandsche School (HIS) Mendut, Borobudur Jawa Tengah (Paassen, 2018).

Gambar 2. *St. Beda School*.

Sumber: Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pringsewu.

Tahun 1932 juga didirikan sekolah *Holland Inlandsche School* (HIS) yang berlokasi di belakang gereja Pringsewu. Sekolah ini dikepalai oleh Suster Enggelmunda. Sekolah HIS ini memiliki tingkatan dari kelas satu sampai tujuh. Siswa yang bersekolah disini adalah anak-anak lurah daerah Wates, Pajaresuk, Tulungagung Gadingrejo, Pringsewu, dan lain sebagainya. Biaya sekolah HIS ini tergolong cukup mahal pada waktu itu sekitar f 2,5 per bulan. Hanya anak-anak orang kaya yang mampu sekolah di sini, seperti anak lurah yang memiliki janggol, beberapa anak Tionghoa yang merupakan pengusaha pabrik beras (Panitia Perayaan Syukur 75 Tahun Gereja Katolik, 2007).

Pastor A. Hemerlink juga mendirikan sekolah dengan tujuan agar pendidikan dapat merata. Sekolah yang didirikan yaitu *Volkschool* kelas satu sampai kelas empat dan *Vervolgschool* kelas empat sampai kelas lima. *Volkschool* dirawat oleh guru-guru lulusan CVO (*Curcus Volk Onderweijis*), sedangkan *Vervolgschool* dirawat oleh guru lulusan NS (*Noemaal School*). Pada Tahun 1938 pendidikan di seluruh Pringsewu sudah terdapat dua sekolah HIS, Sebelas *Volkschool*, dan dua *Vervolgschool*. Sekolah *Volkschool* dan *Vervolgschool* di dirikan di Desa Waluyojati, Ambarawa, Patoman, Gedong Tataan, Tambaksari, Parerejo, Pasir Ukir, Pajaresuk, Tanjung Anom, Tulungagung, Klaten, Gadingrejo dan Bumi Ratu. Sekolah-sekolah ini hanya dipimpin oleh satu guru dan siswa tidak dipungut biaya sama sekali (Panitia Perayaan Syukur 75 Tahun Gereja Katolik, 2007).

Pada Tahun 1934 tiga sekolah *Melania* berkat dukungan dari Departemen di Belanda dan Dewan Utama Belanda dan Jawa, Pringsewu dapat melanjutkan empat sekolah yang dibukanya. Terbukti telah membuka tiga sekolah selama Tahun 1934 (Sint Melania-WerkNijmegen, 1935). Tiga sekolah *Melania* tersebut adalah Sekolah Dasar Melania di Klaten yang dikepalai oleh Ibu Christin, Sekolah Dasar *Melania* Putri di Gadingrejo yang dikepalai oleh suster M. Arnold, dan Sekolah Dasar Melania Tambakrejo yang dikepalai oleh suster M. Yosepha.

Jumlah Sekolah di Pringsewu Tahun 1932-1938 di seluruh Pringsewu telah berdiri 2 HIS, 11 *Volkschool*, dan 2 *Vervolgschool*, kemudian sekolah-sekolah misi yang berada di Pringsewu berjumlah 16 sekolah. Di Pringsewu juga terdapat sekolah yang terlampir dalam arsip *Memorie van Overgave Lampongsche Districten* oleh Residen F.J. Junius yaitu sekolah *Frobelschool*, *Xaverriusschool*, *Sekolah Zuster Francois Caneeschool*, *Sekolah Madrasah M. Islamiah*, dan *Sekolah Volkschool* di Margakarya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan pada bab-bab di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan politik etis kolonial Belanda yang terimplementasi di Pringsewu Tahun 1925-1942 antara lain:

- a. Program irigasi yang dapat dilihat dari adanya pembangunan irigasi Way Tebu. Proses pembangunan Way Tebu melewati beberapa tahapan antara lain, tahap perencanaan yang dimulai pada Tahun 1922 dengan memilih sungai-sungai yang tepat dijadikan sebagai irigasi yang dinilai berdasarkan debit air, pasir, kerikil, dan batuan. Sungai Way Tebu masuk kedalam sungai yang dapat digunakan sebagai irigasi. Tahap selanjutnya yaitu pembangunan irigasi Way Tebu yang dimulai pada Tahun 1926 sampai dengan 1938. Pelaksanaan pembangunan irigasi Way Tebu terbagi menjadi tiga sektor antara lain, sektor Way Tebu I-II pada dibangun pada 1926, sektor Way Tebu III yang dibangun pada 1927, dan sektor Way Tebu IV yang dibangun mulai Tahun 1933 dan selesai pada Tahun 1938.

- b. Program edukasi (pendidikan) yang dapat dilihat dari adanya pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Pringsewu oleh pemerintah Belanda diantaranya yaitu, membangun Sekolah Desa kelas dua di Ganjaran dan Bumi Arum berdasarkan besluit tuan besar Residen Lampung pada tanggal 17 Juni 1939 No. 431. Serta dalam Majalah Pelita Marga Tahun 1937 di Pringsewu terdapat satu Sekolah Lanjutan. Pembangunan sekolah di Pringsewu juga dibantu oleh para kaum misionaris. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh misionaris antara lain sekolah pertama yaitu St. Beda School pada Tahun 1932. Dilanjutkan dengan pembangunan HIS (Holland Inlandsche School) pada Tahun 1932. Sekolah Volkschool kelas satu sampai kelas empat dan Vervolkschool kelas empat sampai kelas lima, dan sekolah Melania pada Tahun 1934. Sehingga pada Tahun 1938 di seluruh Pringsewu telah berdiri 2 HIS, 11 Sekolah Rakyat, dan 2 Vervolkschool.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, D. (2011) *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo (1995) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Laksono, A. . (2018) *Apa itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press.
- Levang, P. (2003) *Ayo ke tanah sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Paassen, C. van (2018) *Padi Tumbuh Tak Terdengar (Padi Groeit Geruisloos)*. Palembang: Rumah Dehonian.
- Panitia Perayaan Syukur 75 Tahun Gereja Katolik (2007) *Bunga Rampai: Kenangan 75 Tahun Gereja Katolik di Paroki Santo Yosef Pringsewu*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Ricklefs, M. . (2005) *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sjamsu, A. M. (1956) *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Jakarta: Djambatan.
- Wasino and Hartatik, E. . (2018) *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- White, J. t. (1925) *Mededeelingen van het Algemeen Proefstation voor den Lanbouw No. 19: Bijdrage tot de Kennis van de Agrogeologie van de Way Limastreek (Lampongsche Districten)*. Departement Van Landbouw, Nijverheid En Handel.

Jurnal:

- Absiroh, U. and Isjoni, B. (2017) 'Understanding of History 350 Years Indonesia Colonized By Dutch', *urnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau*, 1, pp. 1–15.
- Dewi, A. K., Imron, A. and Susanto, H. (2017) 'Masyarakat Kolonis Jawa di Pringsewu Tahun 1925-1945', *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, (01).
- Galih, D. R. (2017) 'Penerapan Politik Etis Di Surabaya Tahun 1911-1930', *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), pp. 751–765.
- Karsiwan, W., & Basri, M. (2013) 'Pembangunan Irigasi Way Tebu Sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda Di Pringsewu Tahun 1927', *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 1(3), pp. 5–24.
- Karsiwan, K. and Sari, L. R. (2021) 'Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung', *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6(1), pp. 1–16.

Web:

Kian Amboro (2022) Jejak Bendung Irigasi Tinggalan Kolonial Belanda di Lampung, Beranda Desa. Available at: <https://www.berandadesa.com/2022/10/jejak-bendung-irigasi-tinggalan.html> (Accessed: 19 January 2023).

Arsip:

Algemene Secretarie Seri Bundel Missive Gouvernements Secretaris (GB MGS) 1890-1942. Koleksi ANRI No. 5027.

Algemene Secretarie Grote Bundel Besluit 1891-1942. Koleksi ANRI No. 1677.

Bataviaasch Nieuwsblad (1939) 'Gedong Tataan krijgt eigen bij-postkantoor'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010864362:mpeg21:pdf>.

De Indische Courant (1937) 'De onderwijs-zorg'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010286212:mpeg21:pdf>.

De Indische Courant (1938) 'De oudste Javanenkolonisatie.-Gedong Tataatim- Als op Java.- De kolonisatie in cijfers.-De ondernemingen.', April. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010285604:mpeg21:pdf>.

De Indische Courant (1940) 'Menu-onderzoek in de Lampongs'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011176756:mpeg21:pdf>.

De Locomotief (1926) 'Irrigatie: Madioen, Soerabaja, Menado, Cheribon. De Plannen Voor 1927.' Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001697046:mpeg21:pdf>.

De Locomotief (1931) 'Groot irrigatie-werk opengesteld. De Way-Teboe werken'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001737077:mpeg21:pdf>.

Deli Courant (1930) 'Irrigatiewerken op Sumatra'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000103034:mpeg21:pdf>.

Deli Courant (1933) 'Kolonisatie Methoden'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000115053:mpeg21:pdf>.

Memorie van Overgave Lampongsche Districten. Koleksi ANRI NO. 15.

Memorie van Overgave Seri 1E J. Van der Zwaal. Koleksi ANRI NO. 15.

Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië (1933) 'De Kolonisatie op Gedong Tataan: Uitvoering van Wai Teboe IV'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229941:mpeg21:pdf>.

Sint Melania-WerkNijmegen (1935) 'ST. MELANIAWERK VOOR ZUID-SUMATRA 1934: Afdeling Pringsewoe'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKDC07:006543011:pdf>.

Sint Melania-WerkNijmegen (1940) 'ST. MELANIAWERK VOOR ZUID-SUMATRA: jaarvergadering afd. Pringsewoe'. Available at: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKDC07:006549002:pdf>.